

**ANALISIS PROSES PENGAKUAN REALISASI PENGELUARAN ANGGARAN DAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH
(studi kasus Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat)**

Muhammad Rizky Hazriansyah Akbar (200912068)

ABSTRACT

This research is focused on the recognition of budget realization. It attempts to achieve two main purposes which is to determine process the recognition of budget realization in Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat and to compare process the recognition of buget realization report with applicable regulations,

The research method used is qualitative analytical descriptive method, The obtained data in this research is accordance with the fact that will be analyzed and interpreted so that it can be made a conclusion and suggestion

The result is shown that the recognition process of budget realization in Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat had properly done .The recognition Process of buget realization report in Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat is appropriate with applicable regulations.

Keyword: recognition of budget realization, buget realization report, budget, and public sector

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Alasan penulis memilih Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah karena merupakan instansi pemerintah yang menjadi objek Penelitian dalam perlakuan akuntansi di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran dan penyusunan laporan realisasi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “**Analisis**

Proses Pengakuan Realisasi Pengeluaran Anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Instansi Pemerintah (studi kasus Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebelum laporan realisasi anggaran dibuat, organisasi sektor publik merealisasikan biaya-biaya yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui efektifitas dalam penyerapan realisasi pengeluaran anggaran dan bagaimana proses pelaporan realisasi anggarannya. Dengan demikian, hal ini memotivasi peneliti untuk menelusuri bagaimana proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran dan laporan realisasi anggran dari program-program pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah proses pelaksanaan pengakuan realisasi pengeluaran anggaran di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku mengenai Penatausahaan APBD DKI Jakarta ?
2. Apakah proses penyajian laporan realisasi anggaran di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah sesuai dengan PSAP NO.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Peraturan Gubernur yang Berlaku ?

1.4. Pembatasan Masalah

1. Proses penelitian ini dibatasi pada realisasi pengeluaran anggaran tidak termasuk realisasi pendapatan
2. Laporan Realisasi anggaran hanya pada proses penyusunan
3. Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada sample transaksi Swakelola
4. Data yang diperoleh hanya pada proses observasi dan izin pemberian data dari obyek yang diteliti.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran dan bagaimana proeses laporan realisasi anggaran di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah proses pelaksanaan pengakuan realisasi pengeluaran anggaran oleh Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Penatausahaan APBD DKI Jakarta.
2. Mengetahui apakah proses penyusunan laporan realisasi anggaran telah sesuai dengan PSAP No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Peraturan Gubernur yang berlaku.

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Organisasi Sektor Publik

- Pengertian Organisasi Sektor Publik

Menurut Deddi Nordiawan (2010) Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang beraktivitas sebagai pelayan publik yang berasal dari dana masyarakat dan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani (Indra Bastian, 2010),

menurut Mardiasmo (2009) organisasi sektor publik adalah organisasi yang berasal dari pendanaan masyarakat yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan perlemen yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

- Pengertian Anggaran

Menurut Indra Bastian (2010) mendefinisikan bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2009) berpendapat anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dapat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang akan dibuat (pengeluaran/belanja); dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2.2. Penatausahaan Pengeluaran menurut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011

– Jenis-Jenis Transaksi

– Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya. Untuk meminta gantinya tentunya UP yang sudah dihabiskan harus dipertanggungjawabkan dulu. UP diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

– Ganti Uang (GU)

Ganti uang adalah Uang dengan jumlah tertentu yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

– Tambah Uang (TU)

Tambah uang adalah Uang yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

– Langsung (LS)

Langsung adalah Uang Muka kerja yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

– Dokumen Pelaksana Anggaran

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

– Surat Penyediaan Dana

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan.

– **Surat Permintaan Pembayaran**

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

– **Surat Perintah Membayar**

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD..

– **Surat Perintah Pencairan Dana**

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM. SP2D adalah spesifik, artinya SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.

2.3. Laporan Realisasi Anggaran

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2

– **Tujuan**

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2011

– **Tujuan**

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target. Target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

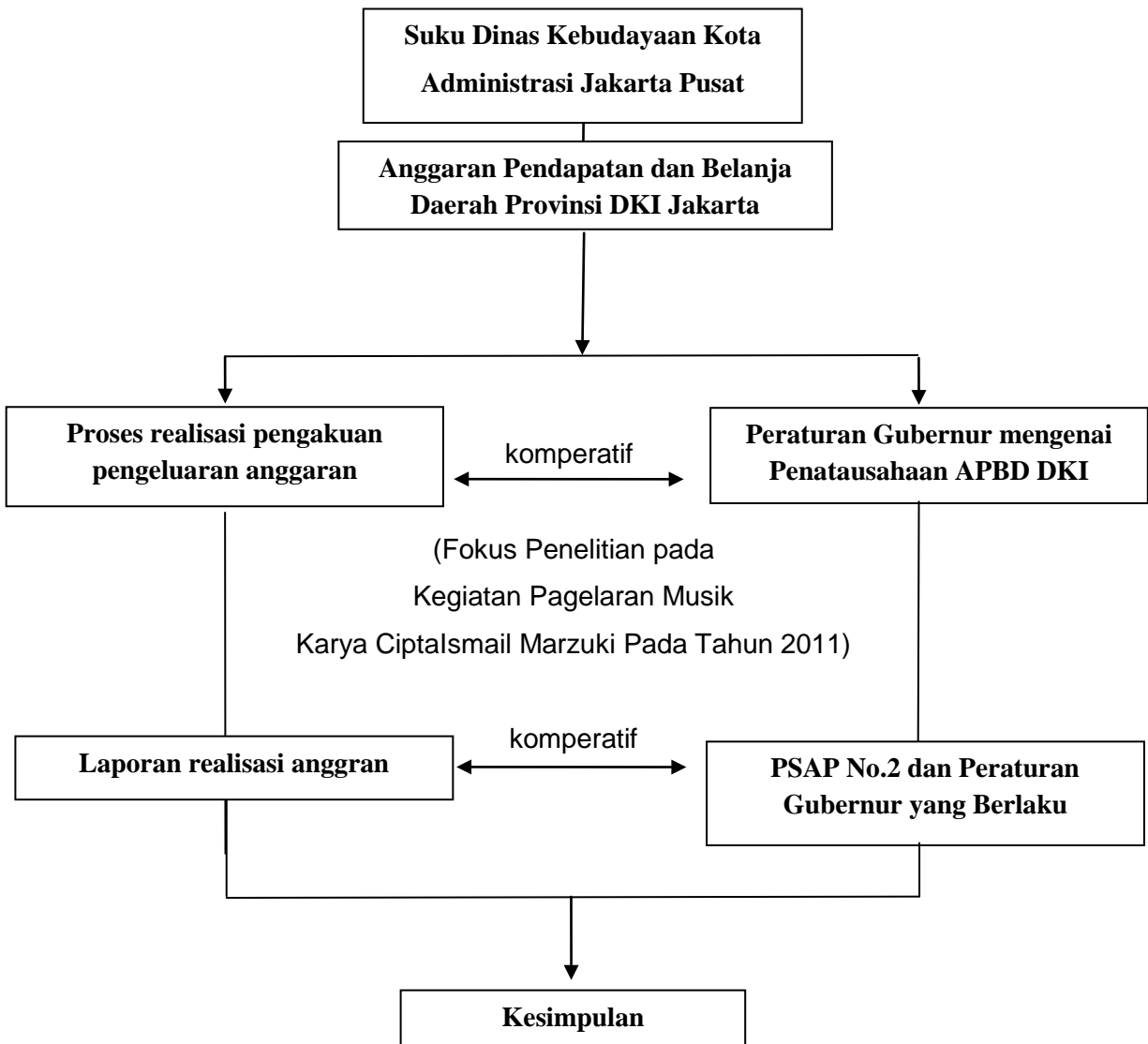
2.5 Pergub Nomer 25 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Ketentuan Umum

– **Ketentuan Umum**

Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang. SKPD merupakan entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang ditentukan. Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang sah. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan ada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi asset dan selain kas pada jurnal.

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2



METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus yaitu dengan meneliti bagaimana proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi DKI Jakarta yang kemudian akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada selama perkuliahan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti hanya akan meneliti hal-hal yang terkait dengan proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Melalui penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran pada dinas tersebut, apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada.

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya di Kantor Walikota Jakarta Pusat Lt.5Jalan Tanah Abang I No.1 Jakarta Pusat.

3.1.2 Sampel transaksi yang dianalisis dalam penelitian

Peneliti mengambil contoh satu transaksi dengan tipe transaksi Swakelola, dengan pertimbangan ketersediaan data (dokumen) yang tersedia lengkap, informatif dan dapat diperoleh peneliti dari narasumber. Transaksi swakelola tersebut adalah, "Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki Pada Tahun 2011". Peneliti memilih transaksi ini sebagai contoh yang dapat digunakan untuk menilai secara keseluruhan rangkaian kejadian transaksi yang diperlukan bagi penelitian ini.

3.1.3 Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah *keypersons* atau orang-orang kunci yang terlibat pada kegiatan swakelola tersebut di atas, pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terdiri dari Kepala Suku Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan staf Subbagian Tata Usaha.

3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung dari bulan Maret 2013 sampai dengan Juli 2013.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dihimpun adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Menurut (Sekaran, 2007) data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat actual terjadinya peristiwa. Pada Penelitian ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan bagian keuangan yaitu tata usaha pada Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat.

2) Data Sekunder

Menurut (Sekaran, 2007) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada. Beberapa sumber data sekunder antara lain bulletin statistic, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen perpustakaan, data online, situs Web, dan internet. Data-data struktur organisasi Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat, Proses realisasi pengakuan pengeluaran anggaran, proses penyusunan laporan realisasi anggaran.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode Deskriptif Kualitatif. Menurut (Sugiono, 2010) deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari, dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi peneliti memberikan perhatian lebih pada salah satu jenis transaksi, yaitu transaksi sukelola yaitu "Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki Pada Tahun 2011". Penulis dapat berasumsi bahwa transaksi ini dapat mewakili transaksi lain terkait proses Pengakuan Penatausahaan dan penyusunan laporannya saja.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Suku Dinas Kebudayaan kota administrasi Jakarta Pusat merupakan unit kerja Suku kerja Dinas Kebudayaan pada Kota Administrasi .Beralamatkan Jalan Tanah Abang

1. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang kepala suku Dinas Kebudayaan. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pagelaran dan pameran, pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan, pelayanan dan monitoring kebudayaan.

4.2. Penerapan Pelaksanaan dan Perbandingan Kebijakan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

– Proses Penerbitan SP2D

Tabel 4.1

No.	Uraian	Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011	Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki	Keterangan
1.	Penerbitan SPP (lampiran)	Setelah SPD diterbitkan oleh PPKD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD yang sebelumnya sudah memeriksa kelengkapan dokumen SPP	Dalam pelaksanaannya, bendahara pengeluaran Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat mengajukan SPP kepada Kepala Suku Dinas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha setelah melengkapi dokumen SPP	Sesuai
2.	Penerbitan SPM (lampiran)	Setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung diterimanya dokumen SPP.	Kepala Suku Dinas menyatakan bahwa SPP telah lengkap dan sah, SPM diterbitkan pada hari kerja berikutnya.	Sesuai
3.	Penerbitan SP2D (lampiran)	Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uangpersediaan uang kepadapengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.	Uang yang dikirim oleh kas daerah langsung masuk ke Bank DKI yang ditunjuk oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat.	Sesuai

Sumber : data diolah oleh Penulis

– Proses Pembayaran Dana

Tabel 4.2

No.	Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011	Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki	Keterangan
1.	Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban	Bendahara pengeluaran pembantu melaporkan realisasi pada bulan dimana kegiatan itu dilaksanakan kepada Kepala Suku Dinas dengan melampirkan kwitansi Suku dinas yang sebelumnya diperiksa kelengkapannya oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.	Sesuai
2.	Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampain pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Setiap bulan bendahara pengeluaran Pembantu melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah atas sepengetahuan dan pengesahan Kepala Suku Dinas.	Sesuai

Sumber : Olahan Penulis

4.3. Penerapan Pelaksanaan dan Perbandingan Kebijakan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

– Proses Penerbitan SP2D

Tabel 4.1

No.	Uraian	Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011	Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki	Keterangan
1.	Penerbitan SPP (lampiran)	Setelah SPD diterbitkan oleh PPKD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Dalam pelaksanaannya, bendahara pengeluaran Suku Dinas Kebudayaan Jakarta	Sesuai

		melalui PPK-SKPD yang sebelumnya sudah memeriksa kelengkapan dokumen SPP	Pusat mengajukan SPP kepada Kepala Suku Dinas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha setelah melengkapi dokumen SPP	
2.	Penerbitan SPM (lampiran)	Setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung diterimanya dokumen SPP.	Kepala Suku Dinas menyatakan bahwa SPP telah lengkap dan sah, SPM diterbitkan pada hari kerja berikutnya.	Sesuai
3.	Penerbitan SP2D (lampiran)	Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan uang kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.	Uang yang dikirim oleh kas daerah langsung masuk ke Bank DKI yang ditunjuk oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat.	Sesuai

Sumber : data diolah oleh Penulis

– Proses Pembayaran Dana

Tabel 4.2

No.	Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011	Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki	Keterangan
1.	Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban	Bendahara pengeluaran pembantu melaporkan realisasi pada bulan dimana kegiatan itu dilaksanakan kepada Kepala Suku Dinas dengan melampirkan kwitansi Suku dinas yang sebelumnya diperiksa kelengkapannya oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.	Sesuai
2.	Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan	Setiap bulan bendahara pengeluaran Pembantu	Sesuai

<p>secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampain pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran</p>	<p>melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah atas sepengetahuan dan pengesahan Kepala Suku Dinas.</p>	
--	--	--

Sumber : Data diolah oleh Penulis

4.4. Kebijakan Akuntansi Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Suku Dinas Kebudayaan

Tabel 4.3

No.	Pernyataan Standar Akuntansi Sektor Publik Nomor 2	Peraturan Gubernur No. 133 Tahun 2007	Pelaksanaan di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Keterangan
1.	Mengatur dalam penyelenggaraan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap diharuskan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.	Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap diharuskan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan akuntansi dan masih menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.	Tidak Sesuai
2.	Entitas pelaporan menyajikan Entitas pelaporan penyajikanklasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.	menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, penggunaan sumber daya ekonomi dan menyediakan	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh	Sesuai

	Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. klasifikasi belanja menurut fungsinya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.	yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.	
3.	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki	Sesuai

Sumber :Data diolah oleh Penulis

4.5. Penerapan Pelaksanaan dan Perbandingan Kebijakan Proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 4.4

No.	Uraian	Pernyataan Standar Akuntansi Sektor Publik Nomor 2	Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2009	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki	Ket
1.	Ketentuan Umum	-	Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang sah.	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mencatat atas belanjadan dilaksanakan oleh Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang sah. (lampiran 8)	Sesuai
2.	Ketentuan Umum	-	PPK SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodic menyusun neraca saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuangan.	Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha melakukan posting pada buku besar dan secara periodic menyusun neraca saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuanganKegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki. (lampiran 8)	Sesuai

3.	Akuntansi Anggaran	teknik pertanggung jawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan	PPK SKPD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh PPKD, Berdasarkan DPA SKPD tersebut, PPK SKPD melakukan akuntansi anggaran dengan mencatat pada jurnal umum	Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lalu pencatat pada jurnal umum (lampiran 8)	Sesuai
4.	Akuntansi Anggaran	pembiayaan Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	PPK SKPD memposting jurnal anggaran yang telah dibuat di jurnal umum ke buku besar tiap kode rekening pendapatan dan belanja (rincian obyek), dan nilai tersebut dicantumkan dalam Laporan Realisasi anggaran	Lalu Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha memposting jurnal anggaran yang telah dibuat di jurnal umum ke buku besar tiap kode rekening belanja lalu dicantumkan dalam Laporan Realisasi anggaran	
5.	Akuntansi Belanja	Belanja diklasifikasik	PPK SKPD menerima SP2D dari	Staf KeuanganSubbagia	Sesuai

		an menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.	kuasa BUD melalui pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, transaksi penerimaan uang persediaan tersebut pada jurnal umum	n Tata Usaha menerima SP2D lalu menjurnalnya pada jurnal umum (lampiran 8)	
6.	Akuntansi Belanja	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	Secara berlaka, PPK SKPD menerima bukti-bukti transaksi belanja yang terutang dalam SPJ belanja yang diperoleh dari Bendahara pengeluaran, lalu Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja dan menjurnalnya	Staf keuangan Subbagian Tata Usaha menerima bukti-bukti transaksi belanja lalu Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, lalu mencatat transaksi-transaksi belanja dan menjurnalnya (lampiran 8)	Sesuai
7.	Akuntansi Belanja	Di akhir periode, PPK SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo	Setiap periode, jurnal tersebut akan dipotong ke buku besar sesuai dengan kode rekening belanja. Di akhir periode, lalu PPK SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo	Setiap periode, jurnal tersebut akan dipotong ke buku besar sesuai dengan kode rekening belanja. Di akhir periode, memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo	Sesuai
8.	Pengembalian Belanja		pengembalian belanja dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). SKPD mendentifikasi	pengembalian belanja terjadi Kegiatan Pagelaran Musik Karya Cipta Ismail Marzuki dijurnal (lampiran 8)	Sesuai

			terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang.		
9.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	PPK SKPD melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD yaitu menyiapkan Kertas kerja dan Format dokumen kertas kerja	Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan menyiapkan Kertas kerja dan Format dokumen kertas kerja	Sesuai
10.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	PPK SKPD melakukan pengisian neraca saldo	Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha melakukan pengisian neraca saldo	Sesuai
11.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	PPK SKPD membuat jurnal Penyesuaian dan jurnal penutup	Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha membuat jurnal Penyesuaian dan jurnal penutup (lampiran 11)	Sesuai
12.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	PPK SKPD menyusun Neraca dan Laporan realisasi Anggaran	Staf Keuangan Subbagian Tata Usaha menyusun Neraca dan Laporan realisasi Anggaran (lampiran10)	Sesuai

Sumber : Data diolah oleh Penul

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran dan laporan realisasi anggran

pada Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Proses realisasi pengeluaran anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah sesuai berdasarkan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat Dan Pengakuan realisasi pengeluaran anggaran telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari seluruh tahapan dalam proses pengakuan realisasi pengeluaran anggaran telah sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Penatausahaan APBD DKI Jakarta..
2. Laporan Realisasi Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Telah dilakukan sesuai dengan PSAP No.2 dan peraturan-peraturan gubernur yang berlaku dan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah disusun sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku

5.2. Saran

Disamping kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengakuan realisasi pengeluaran anggaran. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan merupakan suatu standar operasional prosedur bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun sebaiknya dibuat *manual book* untuk setiap SKPD khususnya Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat. Agar menjadi pedoman yang jelas bagi para pegawai.
2. Melakukan pelatihan-pelatihan kepada pegawai Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar dapat meningkatkan kualitas serta terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkompeten.
3. Menambah SDM agar tercipta kinerja yang lebih cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. Indra. 2006. **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta : Airlangga.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : ANDI.
- Noerdiawan. D. 2010. **AKuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.

Septowati, R. 2010. **Penatausahaan Belanja. Dalam Bahan ajar Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta: BPKP.

Burhanudin. 2010. **Bahan Ajar Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta : BPKP.

Sugiono. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif dan Rnd.** Alfabeta

Sekaran.U. 2007. **Research Methods For Business.** Jakarta: Salemba Empat

Subiyantoro, S. A. 2009. **Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tasikmalaya.**

Silver, D. 2005. **Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace.**

Stiglitz, J. 1999. **On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life.**

Oktavani, M. 2012. **Hubungan Penerapan PSAP Nomer 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat .**

Fatyus Regitra. 2010. **Analisis Realisasi Pengakuan pengeluaran anggaran pada instansi Pemerintah (studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta).** Jakarta. Skripsi STIE Indonesia Banking School.

Republik Indonesia. 2004. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.** Kementrian Keuangan. Jakarta

_____ . 2004. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.** Kementrian Keuangan. Jakarta

_____ . 2005. **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.** Kementrian Keuangan. Jakarta

_____ . 2006. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

_____ . 2011. **Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

_____ .2009. **Peraturan Gubernur Nomer 25 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Ketentuan Umum**

_____ . 2004. **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah**

<https://www.jakarta.go.id/web/produkhukum>